

# JMKSP

(Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)

P-ISSN: 2548-7094 E-ISSN 2614-8021

Volume 4, No 2, Juli-Desember 2019

Evaluasi Kebijakan Program *Full Day School* Pada Sekolah Umum  
*Risnita dan Nova Asvio*

Peran Kepala Sekolah Dalam Mensukseskan Program Literasi  
*Dewi Kartini dan Yuhana*

SMK Berbasis Teknologi di Era Otonomi Daerah (Permasalahan dan Tantangan)  
*Voenly*

Pemanfaatan TIK dalam Menumbuhkan Karakter Religius  
Peserta Didik Sekolah Dasar di Gelumbang  
*Dwi Ammelia Galuh Primasari, Sri Maryani, Suparmanto, dan Diana Juwita*

Supervisi Klinis oleh Kepala Sekolah terhadap Kualitas Pembelajaran  
*Kartini dan Susanti*

Pengaruh Kompetensi Manajerial dan Gaya Kepemimpinan  
terhadap Keinovatifan Pejabat Administrator di Provinsi Jambi  
*Enadarlita*

Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dan Motivasi Guru  
terhadap Prestasi Siswa SD Negeri Sekecamatan Pulau Rimau  
*Tobing Riyanto dan Masniar*

Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru  
*Susilo dan Slamet Sutoyo*

Keterampilan Guru dalam Mengelola Kelas untuk Anak Berkebutuhan Khusus  
*Khoirul Khobir, Muhamad Yusuf, dan Amin Alhusaini*

Pengelolaan Supervisi Akademik di Sekolah Dasar Negeri Pulau Rimau  
*Meili Kurniati dan Haeriyah*

Membangun Karakter Peserta Didik Melalui *Green School* di SMK Negeri 2 Muara Enim  
*Muhammad Kristiawan, Nova Maryanti, dan Happy Fitria*

Pola Pengasuhan Taruna Berbasis Keteladanan Pada Tarunapoliteknik Pelayaran Sumatera Barat  
*Budi Riyanto dan Rivolindo*

Implementasi Sistem Informasi Manajemen di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Padang  
*Hendri Budi Utama, Wachidi, dan Manap Somantri*

# JMKSP

(Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)

Terbit dua kali dalam setahun pada Januari dan Juli. Berisi tulisan Ilmiah Ilmu Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan yang merupakan ringkasan hasil penelitian.

Pelindung:  
Meilia Rosani

Penasihat:  
Bukman Lian

Penanggung Jawab:  
Houtman

Pimpinan Redaksi:  
Happy Fitria

Ketua Penyunting:  
Edi Harapan

Penyunting Ahli:  
Enco Mulyasa (Universitas Islam Nusantara)  
Anakagung Gede Agung (Universitas Pendidikan Ganesha)  
Salahuddin Khan (Gomal University, Pakistan)  
Inaad Mutlib Sayeer (University of Human Development, Sulaimaniya, Iraq)  
Imron Arifin (Universitas Negeri Malang)  
Muhammad Kristiawan (Universitas Bengkulu)  
Muhamad Fahrur Saifudin (Universitas Ahmad Dahlan)  
Yuyun Elisabeth Patras (Universitas Pakuan, Bogor)  
Suhono (Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung)

Penyunting Pelaksana:  
Syarwani Ahmad  
Tobari  
Yasir Arafat

Tata Usaha:  
M. Subhan Halid  
Nur Hidayat

Penerbit  
Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang  
Jl. Jend. Ahmad Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang  
Telp. (0711) 510043 Fax. (0711) 514782  
e-mail: [jurnalmpupgripalembang@gmail.com](mailto:jurnalmpupgripalembang@gmail.com)

## Daftar Isi

Evaluasi Kebijakan Program <i>Full Day School</i> Pada Sekolah Umum <b>Risnita dan Nova Asvio</b> .....	121 - 136
Peran Kepala Sekolah Dalam Mensukseskan Program Literasi <b>Dewi Kartini dan Yuhana</b> .....	137 - 144
SMK Berbasis Teknologi di Era Otonomi Daerah (Permasalahan dan Tantangan) <b>Voently</b> .....	145 - 151
Pemanfaatan TIK dalam Menumbuhkan Karakter Religius Peserta Didik Sekolah Dasar di Gelumbang <b>Dwi Ammelia Galuh Primasari, Sri Maryani, Suparmanto, dan Diana Juwita</b> .....	152 - 159
Supervisi Klinis oleh Kepala Sekolah terhadap Kualitas Pembelajaran <b>Kartini dan Susanti</b> .....	160 - 168
Pengaruh Kompetensi Manajerial dan Gaya Kepemimpinan terhadap Keinovatifan Pejabat Administrator di Provinsi Jambi <b>Enadarlita</b> .....	169 - 179
Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dan Motivasi Guru terhadap Prestasi Siswa SD Negeri Sekecamatan Pulau Rimau <b>Tobing Riyanto dan Masniar</b> .....	180 - 187
Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru <b>Susilo dan Slamet Sutoyo</b> .....	188 - 193
Keterampilan Guru dalam Mengelola Kelas untuk Anak Berkebutuhan Khusus <b>Khoirul Khobir, Muhamad Yusuf, dan Amin Alhusaini</b> .....	194 - 201
Pengelolaan Supervisi Akademik di Sekolah Dasar Negeri Pulau Rimau <b>Meili Kurniati dan Haeriyah</b> .....	202 - 209
Membangun Karakter Peserta Didik Melalui <i>Green School</i> di SMK Negeri 2 Muara Enim <b>Muhammad Kristiawan, Nova Maryanti, dan Happy Fitria</b> .....	210 - 217
Pola Pengasuhan Taruna Berbasis Keteladanan Pada Tarunapoliteknik Pelayaran Sumatera Barat <b>Budi Riyanto dan Rivolindo</b> .....	218 - 224
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Padang <b>Hendri Budi Utama, Wachidi dan Manap Somantri</b> .....	225 - 228

## SMK BERBASIS TEKNOLOGI DI ERA OTONOMI DAERAH (PERMASALAHAN DAN TANTANGAN)

Voeni

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Benakat

e-mail: voenlimeo@gmail.com

**Abstrak:** Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus memenuhi tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejurumannya, pelaksanaan otonomi pendidikan dihadapkan pada suatu persoalan yang ada di daerah, yaitu kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya berkaitan dengan penyediaan dana yang diperlukan. SMK Negeri 1 Benakat adalah SMK Negeri yang di bangun pertama oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim setelah otonomi pendidikan. penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan observasi, analisis, dan dokumendasi kegiatan yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran dan Kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer dan Kegiatan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Android dan Komputer Kelas XII SMK Negeri 1 Benakat Tahun Pelajaran 2018/2019. Dalam Rangka mewujudkan SMK Berbasis teknologi, baik dalam pembelajaran, kegiatan ulangan, dan ujian SMK Negeri 1 benakat secara mandiri, kepala sekolah dengan kesepakatan warga sekolah mengoptimalkan pemanfaat dan penggunaan dana BOS.

**Kata Kunci:** SMK Berbasis Teknologi, otonomi daerah, SMK Negeri 1 benakat

***Abstract:** The establishment of Vocational Schools (SMK) must meet the availability of practical facilities and infrastructure in accordance with their vocational, implementation of educational autonomy is faced with an existing problem in the regions, namely the ability of the regions to carry out education, especially in relation to the provision of necessary funds. Vocational High School 1 Benakat is the first State Vocational School established by Muara Enim Regency Government after education autonomy. this study researchers used data collection with observation, analysis, and documentation of activities carried out during the learning process and Computer Based National Examination Activities and National Standardized School Test Activities Based on Android and Computers Class XII of SMK Negeri 1 Benakat Academic Year 2018/2019. In order to realize technology-based SMK both in learning and repetition activities and examinations of State Vocational High School 1 benakat independently, the Principal with the agreement of the school community to optimize the utilization and use of BOS funds.*

***Keywords:** Technology-Based Vocational School, regional autonomy, Vocational School 1 benakat*

### PENDAHULUAN

Berlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berdampak banyak Urusan pemerintahan pusat yang didelegasikan kepada pemerintah Kabupaten /Kota termasuk bidang pendidikan, peran dan fungsi pemerintah daerah menjadi semakin

besar dalam berbagai hal termasuk pendidikan.

Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa (Kristiawan, 2016). Oleh karenanya kemajuan suatu bangsa dapat ditandai dan diukur dari kemajuan pendidikannya. Kemajuan beberapa

negara di dunia ini tidak terlepas dari kemajuan yang dimulai dan dicapai dari pendidikannya (Maksum dan Ruhendi, 2004).

Dalam pelaksanaannya, pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang bermutu atau berkualitas. Kualitas pendidikan meliputi: (1) produk pendidikan yang dihasilkan berupa prosentase peserta didik yang berhasil lulus dan lulusan tersebut dapat diserap oleh lapangan kerja yang tersedia atau membuka lapangan kerja sendiri, baik dengan cara meniru yang sudah ada atau menciptakan yang baru; (2) proses pendidikan, menyangkut pengelolaan kelas yang sesuai pada kondisi kelas yang relatif kecil, penggunaan metode pengajaran yang tepat serta lingkungan masyarakat yang kondusif; dan (3) adanya kontrol pada sumber-sumber pendidikan yang ada (Sihombing dan Indardjo, 2003).

Tantangan pendidikan kejuruan semakin kompleks dengan adanya tuntutan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat canggih dan mengalami perubahan yang sangat cepat (Kristiawan, 2014) (Tobari dkk, 2018) (Kristiawan dkk, 2017). Bukit (2014) menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan (*Vocational Education*) sebagai pendidikan yang berbeda dari jenis pendidikan lainnya harus memiliki karakteristik sebagai berikut; 1) berorientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja; 2) justifikasi khusus pada kebutuhan nyata di lapangan; 3) fokus kurikulum pada aspek-aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif; 4) tolak ukur keberhasilan tidak hanya terbatas di sekolah; 5) kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja; 6) memerlukan sarana dan prasarana yang memadai; dan 7) adanya dukungan masyarakat.

SMK Negeri 1 Benakat sebagai Sekolah Menengah Kejuruan yang didirikan semenjak otonomi daerah (otoda) tepatnya pada tahun 2006 dengan tiga program keahlian (kompetensi keahlian) antara lain 1) Program keahlian (kompetensi Keahlian) Akuntansi (AK); 2) Program keahlian

(kompetensi Keahlian) Administrasi Perkantoran (AP); 3) Program keahlian (kompetensi Keahlian) Teknik Kendaraan Ringan (TKR). Sekolah menengah kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama agar siap bekerja dalam bidang tertentu. Diharapkan lulusan SMK adalah lulusan yang kompeten, mampu bersaing, berkarakter, dan berjiwa *interpreneur*, dengan menguasai teknologi dan informasi yang terus berkembang pesat (Fitria, 2018).

Dalam era reformasi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah. Pertama adalah UU No.22/1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kedua adalah UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah

Pemberlakuan Otonomi daerah, dan desentralisasi, memberikan ruang (kewenangan) pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program yang sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Pengelolaan sumberdaya yang dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab oleh pemerintah serta melibatkan masyarakat setempat sangat berpotensi mengurangi kesenjangan yang semakin melebar disegala bidang.

Di era otonomi daerah Bidang pendidikan mengalami perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari kuantitas atau jumlah USB (Unit Sekolah Baru) yang di bangun untuk jentang pendidikan menengah terkhusus Sekolah menengah Kejuruan (SMK) yang tersebar di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut gambar diagram data SMK 2015-2017:



Gambar 1. Data SMK pada 2015 s.d 2017 (Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud RI 2017).

SMK Negeri di Kabupaten Muara Enim sebelum Otda memiliki 2 SMK Negeri yaitu SMK Negeri 1 Muara Enim di Kota Muara Enim yang sebelumnya disebut SMEA Muara Enim dan SMK Negeri 1 Gelumbang di Kecamatan Gelumbang yang sebelumnya disebut SMK Pertanian Gelumbang.

Setelah otda Pembangunan pendirian SMK Negeri sebanyak 9 (sembilan) Gedung USB yang tersebar di Kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muara Enim di antaranya 1) SMK Negeri 2 Muara Enim lokasi dalam kota Muara Enim; 2) SMK Negeri 1 Benakat; 3) SMK Negeri 1 Tanjung Agung di; 4) SMK Negeri 1 Semende Darat Laut; 5) SMK Negeri 1 Rambang Dangku; 6) SMK Negeri 1 Lubai Ulu; 7) SMK Negeri 1 Belimbing; 8) SMK Negeri 1 Sungai Rotan; 9) SMK Negeri 1 Belida Darat

Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Pasal 4 ayat 1 Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi a) hasil studi kelayakan; b) isi pendidikan; c) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga

kependidikan; d) sarana dan prasarana pendidikan; e) pembiayaan pendidikan; f) sistem evaluasi dan sertifikasi; dan g) manajemen dan proses pendidikan.

Ayat 2 Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendirian satuan pendidikan harus melampirkan a) hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis; b) hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; c) data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; d) data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis; e) data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada.

Pasal 5 Khusus pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus memenuhi a) tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejurumannya; b) adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu; c) adanya potensi lapangan kerja; d) adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan e) adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha/industri.

Dalam pelaksanaannya, otonomi pendidikan dihadapkan pada suatu persoalan yang ada di daerah, yaitu kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya berkaitan dengan penyediaan dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan tersebut. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, pemerintah (pusat maupun daerah) diwajibkan menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanjanya. Karena tidak semua daerah memiliki kekayaan alam dan

sumber-sumber keuangan yang memadai. Terkait dengan hal ini, dalam kenyataannya tidak sedikit sekolah-sekolah yang masih tinggi tarif pendidikannya. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah apakah kebijakan desentralisasi pendidikan itu dilakukan secara menyeluruh (untuk semua daerah, apapun kondisinya) atau tidak (Zainuddin, 2015).

SMK Negeri 1 Benakat adalah SMK Negeri yang di bangun pertama oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim setelah otonomi pendidikan yang lokasi sekolahnya berada di wilayah kecamatan berjarak  $\pm$  40 Km dari kota Muara Enim. Dari Pengamatan dan dokumen yang ada disekolah pada saat pendirian dan pembangunan SMK Negeri 1 Benakat belum Mengacu pada Peraturan Menteri No.36 Tahun 2014 tentang pendirian SMK hal tersebut karena akibat kemampuan anggaran daerah yang belum memadai untuk pendanaan pendirian SMK, sehingga yang di persiapkan pada awal pendirian hanya Gedung dan Perlengkapan yang seadanya saja, belum mempunyai fasilitas yang menunjang lainnya seperti yang di amanatkan dalam Pasal 4 ayat 1 c) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; d) sarana dan prasarana pendidikan. Pasal 5 khusus point (a) harus memenuhi tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah berbagai bentuk peralatan dan system yang digunakan untuk memperoleh, memproses, mengelola, memanipulasi, memindah, menyimpan dan menyebarkan informasi melalui media elektronik (Isjoni, 2008).

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan diterapkan dalam berbagai bidang kegiatan. Robertson mengatakan TIK digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan dan pengaruhnya diperkirakan akan membawa dampak yang lebih besar terhadap dunia akan datang (Isjoni : 2008). Penerapan TIK terutama adalah

memberikan kecepatan memperoleh dan mengolah informasi sehingga mampu membantu menetapkan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

Tuntutan kualifikasi seorang guru yang profesional tidak terlepas dari penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, mengingat peran guru sebagai pemberi informasi dan agen pembelajaran bagi siswa. Untuk menyeimbangkan tuntutan kualifikasi guru tersebut dibutuhkan sarana yang memadai yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yakni tersedianya *Laptop*, *Portable Computer*, dan *Liquid Crystal Display (LCD)*.

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Dit PSMK) menerapkan kebijakan untuk membudayakan TIK dilingkungan SMK (Mustafa : 2007). Dit PSMK menerapkan berbagai program pelatihan secara bertahap sehingga mulai tahun 1999, Dit PSMK memperkenalkan TIK dilingkungan SMK. Fokus utama Program TIK Dit SMK adalah percepatan penyiapan tenaga kerja yang kompeten dibidang TIK. Dan Fokus yang kedua adalah penyediaan tenaga guru yang kompeten dalam bidang penguasaan materi dan dalam metode pembelajaran dengan pemanfaatan TIK (Mustafa, 2007). SMK telah menerapkan pembelajaran yang menerapkan TIK sejak tahun 1999 dengan diberlakukannya Kurikulum SMK edisi 1999. Didalam kurikulum SMK Edisi 1999 terdapat mata pelajaran Komputer yang masuk didalam Kelompok Mata Pelajaran Adaptif dan diberikan kepada semua Program Keahlian. Pada tahun 2004 dengan diberlakukannya kurikulum Edisi 2004, Mata Pelajaran Komputer diganti dengan Mata Pelajaran Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) dimana didalam Mata Pelajaran KKPI ini terjadi pengembangan materi kepada penguasaan Pengelolaan Informasi. Demikian juga dengan Standar Isi Mata Pelajaran KKPI Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan SMK mengandung substansi materi yang sama dengan kurikulum SMK edisi 2004.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) karena yang diteliti adalah sesuatu yang ada di lapangan, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data dari suatu lembaga atau sekolah tertentu. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Arifin (2011) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.

Bogdan dan Taylor (1993) mengemukakan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dalam (Arifin, 2011). Sedangkan menurut Sugiyono (2010) mengemukakan dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara, kuisioner, dokumentasi.

Arifin (2011) ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu 1) observasi partisipasi; 2) wawancara; 3) diskusi kelompok terfokus; 4) studi dokumen; dan 5) analisis. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan observasi, analisis, dan dokumendasi kegiatan yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran dan Kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Kegiatan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Berbasis Android dan Komputer Kelas XII SMK Negeri 1 Benakat Tahun Pelajaran 2018/2019

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah mempersiapkan peserta didik fokus untuk bekerja dalam bidang tertentu, melalui penyiapan peserta didik untuk: meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik; dapat menjalani kehidupan secara layak, menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab; memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, dan menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan dan seni. Lulusan pendidikan kejuruan/SMK diharapkan punya kompetensi (lima elemen kompetensi) sesuai kebutuhan pemangku kepentingan (stake holder). 1) kebutuhan social/masyarakat (societal needs); 2) kebutuhan dunia kerja (industrial needs); 3) kebutuhan profesional (professional needs); 4) kebutuhan generasi masa depan (vision); dan 5) kebutuhan ilmu pengetahuan (scientific).

SMK Negeri 1 Benakat yang beralamat jalan raya padang bindu kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim dari mulai di bangun pada tahun 2006 hanya memiliki ruang belajar siswa berjumlah tiga kelas ruang kegiatan belajar, satu ruang kantor untuk guru dan staff dan ruang Kepala Sekolah, serta satu ruang perpustakaan yang masih belum selesai, Guru dan Tenaga administrasi pada saat sekolah baru didirikan pun belum ada sama sekali hanya ada seorang kepala sekolah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Artinya pada saat pendirian SMK Negeri 1 Benakat memang jauh dari amanat Permendikbud No.36 Tahun 2014 tentang pendirian SMK Pasal 4 ayat 1 c) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; d) sarana dan prasarana pendidikan. Pasal 5 khusus point (a) harus memenuhi tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejurumannya.

Tahun Pelajaran 2018/2019 SMK Negeri 1 Benakat telah terakreditasi B oleh BAN S/M , mempunyai peserta didik atau



siswa berjumlah 354 orang telah memiliki 13 rombongan dan memiliki ruang kelas belajar masing-masing, Kompetensi Keahlian TKR telah memiliki Ruang Bengkel yang sarana dan prasarannya masih terus ditambah dan ditingkatkan, Kompetensi Keahlian Akuntansi telah memiliki ruang praktik siswa tersendiri yang dilengkapi dengan sarana komputer dan perlengkapan praktik lainnya yang harus di tingkatkan terus menerus dari sumber dana sekolah yang ada, Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran tahun Nopember 2018 telah mendapat bantuan ruang praktik siswa (RPS) dari direktorat PSMK.

Permasalahan yang sampai sekarang masih menjadi kendala di SMK Negeri 1 Benakat selain masih banyak perlengkapan praktik siswa yang harus di tingkatkan, yang paling penting yaitu untuk memenuhi jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Karena sampai penelitian ini dilakukan jumlah pendidik Guru di SMK Negeri 1 Benakat berjumlah 27 orang terdiri dari 13 orang ASN dan 14 Orang Guru Honorer, untuk tenaga kependidikan/ staff TU dan tenaga lainnya berjumlah 8 orang yang keseluruhannya Honorer.

Pendidik yang berjumlah 27 Orang tersebut masih terdapat beberapa guru tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan S1 dengan bidang yang di ajarkan baik guru Normatif dan Adaptif serta untuk guru produktif Kompetensi Keahlian TKR hanya memiliki 1 orang guru yang liner kualifikasi pendidikan S1 sedangkan dua orang guru harus di tutupi dengan guru yang tidak sesuai kualifikasi pendidikan TKR, Kompetensi Keahlian AK sudah memadai kualifikasi Pendidikan S1 guru bidang studinya karena sudah ada dua orang ASN dan di bantu tiga orang Guru Honorer yang juga mempunyai kualifikasi S1 Akuntansi. Untuk kompetensi AP sampai saat ini setelah SMK Negeri 1 Benakat 12 Tahun didirikan belum satu pun ASN dan Honorer yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan pendidikan S1

administrasi perkantoran yang mengajar di kompetensi keahlian tersebut.

SMK Negeri 1 Benakat dalam rangka penerapan SMK berbasis Teknologi pada tahun pelajaran 2018/2019 telah mengadakan UNBK mandiri dan USBN Berbasis Android dan komputer secara mandiri.

Gambar 2. dokumentasi kegiatan UNBK dan USBN berbasis android



Dalam Rangka meujudkan SMK Berbasis teknologi baik dalam pembelajaran dan kegiatan ulangan dan ujian SMK Negeri 1 benakat secara mandiri, Kepala Sekolah dengan kesepakatan warga sekolah mengoptimalkan pemanfaat dan penggunaan dana BOS yang di terima setiap triwulan untuk pengadaan bahan dan material serta sarana dan Prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran, ulangan dan ujian yang memerlukan dana yang besar untuk pembelian Komputer, Infokus, laptop, serta pembiayaan pembuat jaringan LAN dan perlengkapannya untuk kegiatan Ujian Nasional Berbasis Komputer dan Ujian Sekolah berstandar Nasional (USBN) Berbasis Android dan Komputer yang telah dilaksanakan dan sukses di tahun pelajaran 2018/2019.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat peneliti tentang SMK berbasis teknologi di era otonomi daerah, permasalahan dan tantangan yang di hadapi SMK Negeri 1 Benakat masih memerlukan perhatian yang lebih serius dari semua pihak yang konsen terhadap dunia pendidikan terkhusus Sekolah menengah Kejuruan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2011). Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1993). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bukit, M. (2014). Strategi dan Inovasi Pendidikan Kejuruan Dari Kompetensi ke Kompetensi. Bandung: Alfabeta.
- Fitria, H. (2018). The Influence Of Organizational Culture And Trust Through The Teacher Performance In The Private Secondary School In Palembang. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(7).
- Isjoni. (2008). Model-model Pembelajaran

Mutakhir. Jakarta: Pustaka Pelajar.

- Kristiawan, M. (2016). Telaah Revolusi Mental dan Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Pandai dan Berakhlak Mulia. *Ta'dib*, 18(1), 13-25.
- Kristiawan, M. (2014). A Model for Upgrading Teachers Competence on Operating Computer as Assistant of Instruction. *Global Journal of Human-Social Science Research*.
- Kristiawan, M., Ahmad, S., Tobari, T., & Suhono, S. (2017). Desain Pembelajaran SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III Berbasis Karakter Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 2(2), 403-432.
- Maksum, A., & Ruhendi, L. Y. (2004). Paradigma Pendidikan Universal. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sihombing, U., & Indardjo. (2003). Pembiayaan Pendidikan.
- Sugiyono. (2010). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tobari., Kristiawan, M., & Asvio, N. (2018). The Strategy of Headmaster on Upgrading Educational Quality In Asean Economic Community (AEC) Era. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(4).
- Zainuddin, M. (2015). Reformasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah. Malang: Universitas negeri Malang.